

Dr. Sulaiman N. Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sulaiman N. Sembiring, S.H., M.H., lulus dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jurusan Hukum Internasional. Magister Hukum diraih di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan gelar Doktor Hukum diperoleh dari Universitas Islam Sultan Agung dengan predikat *Cum Laude*. Pendidikan tambahannya adalah mengikuti program psikologi klinis di Universitas Islam Bandung, kursus di Goethe Institute, Program *General Education* di St. George Technical College, Kogarah, NSW, Australia dan *LLM Program on Climate Change Policy and Law (Long Distance Program)* di Strathclyde University, Glasgow, Inggris.

Dr. Sulaiman memiliki rekam jejak berkarya yang panjang dalam bidang riset, advokasi, serta sebagai ahli hukum (*expert*) dalam berbagai program, baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Ia pernah menjadi tenaga ahli untuk anggota DPR Komisi VII (bidang Minyak, Gas, dan Lingkungan) dan Komisi III (Bidang Hukum dan HAM), *Inhouse Lawyer* pada PT Alam Bukit Tigapuluh Jambi (pemilik konsesi Restorasi HPH), *National Senior Legal Advisor* pada AHT GROUP AG Germany, Proyek Konsesi Restorasi Ekosistem PT ABT, Konsultan Ahli Hukum Lingkungan pada ADB Indonesia, konsultan hukum untuk PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), *National Senior Legal Advisor* di KPH Gularaya Partnership, tenaga ahli hukum pada Direktorat Perlindungan dan Pengamanan Hutan (Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), Konsultan Pada Bapedalda Provinsi Papua Barat, Component-1 Team Leader dan Ahli Hukum Kehutanan di EC-Indonesia FLEGT *Support Project (Forest Law Enforcement, Governance and Trade)*, Konsultan pada *Partnership for Government Reform*, Konsultan Hukum pada proyek penelitian tentang Tata Kelola Pemerintahan di bidang Kehutanan untuk Program *Forest Carbon Program Development in Berau-Kalimantan Timur: A joint research with The Nature Conservancy*, Konsultan Hukum untuk Proyek Pengelolaan Hutan Batang Toru, Sumatera Utara, Anggota Tim Perencanaan Pengembangan Kehutanan Strategis Aceh (TIPERESKA), anggota Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (TIM KORMONEV), Konsultan Hukum untuk Proyek Penanganan Kebakaran Hutan di Sumatra Selatan (didukung European Commission), Pendiri dan Direktur Eksekutif, Institut Hukum Sumberdaya Alam/IHSA (*Natural Resources Law Institute*), Koordinator dan Peneliti Senior untuk studi “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Hutan di Indonesia”, merupakan penelitian yang berkolaborasi dengan CIFOR, Koordinator Konsultan Hukum pada Proyek “*Identification and Compilation of Regulation related to Illegal Logging*”, pendanaan didukung oleh GreenCom Project-USAID, Koordinator Konsultan Hukum dan Peneliti untuk Studi tentang “Penanganan Kejahatan Hutan pada Pembalakan Liar dan Perdagangan Satwa Terlarang: Sebagai suatu Alternatif bagi Papua”. Ia juga merupakan melakukan penelitian lingkungan berkolaborasi dengan Conservation International Indonesia, Advisor Hukum ICDP, GOI-World Bank, Kerinci Seblat National Park, Sumatra, Legal Forestry Expert pada US Agency for International Development’s Natural Resources Management/EPIQ Program (NRMP-USAID), Program Manager Kebijakan dan Hukum pada Kalimantan Action Network-Sundaland Bioregion, Worldwide Fund for Nature (WWF/Indonesia). Kalimantan Timur, Peneliti dan berturut-turut menjabat:

Manajer Internal; Kepala Divisi Kasus dan Advokasi: Manajer Riset pada Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Konsultan untuk US Agency for International Development's Natural Resources Management/EPIQ Program (NRMP-USAID), berkolaborasi dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Tim Perumusan Harmonisasi Hukum, Departemen Kehakiman Republik Indonesia (Badan Pembinaan Hukum Nasional: Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. G-99.PR.09.03), Anggota Tim Reformasi Perum Perhutani, Kementerian Kehutanan dan Perkebunan, Staff of Delivery Division Monroe Engineering/Omni Office Interior Equipment, Kirrawee, NSW/Sydney, Australia, Staff/ General Worker, Command Engineering Co, Kirrawee, NSW/Sydney, Australia, serta Pendiri/Senior Partner pada Sulaiman N. Sembiring, Hardiyanto, and Partners Law Firm. Memberikan advis hukum kepada PT Telkomsel, PT Indosat, PT Axis dan beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia serta penanganan beberapa kasus Perdata dan Pidana.

Aktivitas di bidang organisasi sebagai anggota PERADI SAI (Perkumpulan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia), Ketua Komite Pendidikan PERADI SAI Tangerang Raya (2016-2021), Ketua Komite Pembelaan Profesi Advokat, PERADI SAI Tangerang Raya (2022- 2026), dan Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI TANGERANG RAYA (2023-2028).

Ia juga melakukan berbagai studi-studi perbandingan (*comparative studies*) di berbagai negara seperti Australia (proyek kajian dan penulisan buku "Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (The Guideline on Class Actions), New Delhi, India (studi Kebijakan dan Hukum India terkait Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hutan), . Studi perbandingan dilakukan melalui seri diskusi dengan Lawyer WWF India dan sejumlah Aktivis Hukum dari LSM di India. Hosted by Center for Environmental Law, Worldwide Fund for Nature, India, New Delhi. (April 4-24, 1997), Studi Perbandingan tentang Implementasi Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) di Singapura, Malaysia, dan Philipina.

Training yang pernah diikuti Adalah Policy and Advocacy Course at Australian Council for Overseas Aid (ACFOA). Funded by The Center for Democratic Institutions (CDI). Canberra-Sydney (1999) dan Public Interest Advocacy Training and Worldwide Environmental Network (Environmental Law Alliance Worldwide, United State of America, 1995).

Kontribusinya dalam perancangan perundang-undangan adalah Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Pembalakan Liar, Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan, Rancangan UU Pengelolaan Pesisir, Rancangan UU Sumberdaya Air, dan Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat tentang Kehutanan, Pendampingan Masyarakat Adat Desa Pulau Tengah, Kabupaten Merangin, Jambi dalam Perancangan SK Adat tentang Penetapan Hutan Adat yang dilindungi, Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Tim Perancang Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Lingkungan Hidup

tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan,

Keanggotaan dalam jaringan profesional adalah sebagai Pendiri dan Direktur Eksekutif, Indonesian Center for Telecommunication Law (ICTL), Co-Founder Gerakan Masyarakat Anti Illegal Logging, Kalimantan Timur, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW), Member and Co-Founder of Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam/APKSA Kalimantan Timur, Member of Steering Committee, Forest Watch Indonesia, Member of Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat/FKKM, *Coordinator and Co-Founder*, Jaringan Advokasi Pulp and Kertas/JAPAS (Pulp and Paper Advocacy Network), *Coordinator and Co-Founder of* Jaringan Advokasi Bersama Kebakaran dan Pembakaran Hutan dan Lahan Indonesia (National Alliance for Advocacy on Forest and Land Fire).

Karya tulis publikasi antara lain:

1. Pengelolaan Satelit oleh Industri Perbankan: Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, diterbitkan oleh Indonesian Center for Telecommunication Law, 2015.
2. Sembiring, SN, Presentation Materials on Policy and Law in Natural Resources Management in Indonesia, Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA), 2002.
3. Sembiring, SN, Memperkuat Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Konsultasi Publik dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi, dengan pendekatan partisipasi kepada area pengelolaan lindung pada transisinya: Pelajaran didapatkan pada era desentralisasi dan reformasi Indonesia, Program Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) Agustus, 2001.
4. Sembiring, SN., Kajian Tentang Pedoman Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional: dilengkapi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Diterbitkan oleh Departemen Kehutanan, Penulis, 2001.
5. Sembiring, SN., Djamaan, 2004. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Konteks Otonomi Daerah, 26 Jilid yang berisi 700 regulasi, termasuk regulasi tentang hewan yang dilindungi dan perdagangan satwa liar. Penghimpun. IHSA.
6. Sembiring, SN., Makinuddin, N., Rahardjo, S., Phantom and Marbyanto, E., Editor 2000. Menjadi Tuan di Tanah Sendiri; Menuju Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya alam Kalimantan Timur, *Editor*. Sebuah kerja sama dengan NRM-USAID, Pemda Provinsi Kalimantan Timur, WWF Indonesia dan APKSA.
7. Sembiring, SN. Pemerintahan Demokratis dan Bukit Suharto. 30 Agustus 1999, di Kalimantan Post, Koran Kalimantan Timur.
8. Sembiring, SN., Husbani, F., Muhammad, A., Ivalerina, F., and Hanif, F., 1999. Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran serta Masyarakat, Penulis. *Author* (NRM-USAID and ICEL).

9. Sembiring, SN., Husbani, F., Muhammad, A., Ivalerina, F., and Hanif, F., 1999. Kumpulan Peraturan Perundang-undang Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. 7 jilid, 157 Peraturan. Penghimpun. ICEL.
10. Sembiring, SN., 1999. Reformasi Hukum Sumberdaya Alam Hutan. Dirilis pada Demokratisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam. ICEL.
11. Sembiring, SN., Santosa, MA., Cornwall, A., and Wijardjo, B., 1998. Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan, Penulis. ICEL, YLBHI and PIAC, Australia.
12. Sembiring, SN., Hukum dan Advokasi Lingkungan. Editor, ICEL 1998.
13. Sembiring, SN., "Legal Standing", "Class Actions" dan Gugatan Walhi. 19 Februari 1998. Dirilis pada Suara Pembaruan (Koran Nasional).
14. Sembiring, SN., and Santosa, MA., 1997 Hak Gugat Organisasi Lingkungan, Penulis. ICEL.
15. Sembiring, SN and Santosa, MA, Menambang di Kawasan Lindung, ICEL-WWF, 1997.
16. Sembiring, SN., and Santosa, MA., Rahmadi, T., Ratnawati, RV., 1997. Penerapan Azas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Lingkungan Hidup. ICEL.
17. Sembiring, SN., and Santosa, MA., Editor. 1997, Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. ICEL.
18. Sembiring, SN., 11 November 1997. Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23/1997 dan Aktivitas Industri. Bisnis Indonesia (Koran Nasional).
19. Sembiring, SN., NGO's Legal Standing in Indonesia, 1996. In Environmental Law Journal/ELJ (English Edition). ICEL.
20. Sembiring, SN., 26 September 1994. Mempertanyakan Kembali Hak Pengusahaan Hutan. Dirilis Republika (National Newspaper).

Konferensi Internasional yang pernah diikuti:

1. Menghadiri Chatam House Discussion on Illegal Logging and VPA Processes Experiences, London, UK. June, 2009.
2. Mempresentasikan Paper dengan judul "Autonomy and the future of Conservation Area Management in Indonesia" in the workshop: Conservation for/by whom? Social Controversies & Cultural Contestations regarding National Parks and Reserves. in the "Malay Archipelago". A workshop sponsored by: Department of Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, NUS; Department of Biological Science, NUS; Asia Research Institute, NUS; co-organized as well by the Law Faculty, NUS, with endorsement from the Study Group on Indonesia and the Study Group on Malaysia. Singapore, May 16-18, 2005.
3. Regional Forum on Capacity Building for Integrated Water Resources for Southeast Asia in Malaysia, December 2002.
4. Southeast Asia Regional Dialogue on Water Governance, Bangkok, Thailand, November 2002.
5. Menghadiri Environmental Law Alliance (ELAW) Annual Meeting, Arusha, Tanzania, Africa. July 24-28, 2000.
6. Menghadiri Environmental Law Alliance (ELAW) Annual Meeting, Sydney, Australia, December 1998.

7. Menghadiri International Conference on Biodiversity and Indigenous People Knowledge, Madrid, Spain, 1997.

EDITOR IN CHIEF

Dr. Ratna Indayatun, S.H., M.H. merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf. Ia mengampu sembilan mata kuliah hukum (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Keterampilan Hukum, Hukum Kepailitan, Hukum Persaingan Usaha, Studi Kasus Hukum Pidana dan Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Peradilan Agama, Etika Profesi, Hukum Administrasi Negara, Ilmu Perundang-Undangan, serta mata kuliah Hukum dan Konstitusi).

Dr. Ratna lulus Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung, Magister Hukum dari Universitas Trisakti, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur. Aktif menulis berbagai karya ilmiah hukum dan non hukum. Ia merupakan advokat yang terdaftar di Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradi). Tahun 2022-2026 menjadi Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Advokat di DPC Peradi Tangerang Raya.

Karya ilmiahnya antara lain:

- *Legal protection of online-based transportation workers in the era of digitalization* (2025).
- Meningkatkan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Pembuatan Baju dengan Pewarnaan Teknik *Tie Dye* di Desa Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang (2025).
- Dampak Teknologi Terhadap Hukum Kontrak: Tantangan dan Peluang (2025).
- Analisis Kinerja Keuangan pada PT Bank Syariah Indonesia (2024).
- Pertanggungjawaban Sipir terhadap Narapidana yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang (2024).
- Pelatihan Menghias Tote Bag Menggunakan Daun dan Bunga di Sekitar Rumah Untuk Mendorong Kreativitas Anak- anak di Desa Daon Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang (2024).
- Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Kepada Demonstran di Kota Tangerang Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum (2023).
- Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh PT TJS (2023).
- Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (2023).
- *Juridical Review of The Winning of The Empty Boxes in Regional Head Elections* (2023).
- Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak/Usia Dini di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang (2023).
- *Consumer Protection in Buying and Selling Online* (2022).
- *Cyberbullying in Criminal Law Perspective* (2022).
- *Implementation of The Employment Social Security Administering Body's Responsibilities for Workers Who Have Accidents* (2022).

- Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama pada PT Adira Finance Tbk (2020).

Karya dalam bentuk buku:

- Hukum Ekonomi: Mengatur Aktivitas Ekonomi (2025).
- Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Berbasis Online (2025).